

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Untuk mengurangi permasalahan tenaga kerja pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu tujuan pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah sebuah usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas angkatan kerja dan mengarahkan pendapatan yang merata yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Arsyad, 2010). Tujuan inti dari proses pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial.

Masalah penyerapan tenaga kerja juga erat kaitannya dengan kebijakan upah minimum. Upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan produsen sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja (Sudarsono, 1990). Teori permintaan tenaga kerja menempatkan upah sebagai harga dari tenaga kerja, permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk membelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha dalam rangka meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat.

Upah minimum adalah tingkat upah paling rendah yang masih boleh dibayarkan perusahaan kepada para pekerjanya. Artinya, upah yang dibayarkan kepada pekerja tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum yang sudah ditetapkan. Menurut Buchari, dampak yang terjadi dari penetapan kebijakan upah minimum adalah perusahaan harus menaati kebijakan pemerintah terhadap tingkat upah yang semakin tinggi setiap tahunnya. Sehingga otomatis perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja atau menurunkan permintaan tenaga kerja. Sementara disisi lain orang-orang yang mencari pekerjaan akan menjadi lebih bersemangat mencari kerja dikarenakan tingginya tingkat upah yang diberikan. Besarnya upah bersumber pada KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Dampak lainnya yang ditimbulkan adalah meningkatnya jumlah pengangguran karena para pengusaha harus mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan<sup>1</sup>.

**Tabel 1.1 Upah Minimum Kabupaten/Kota Per Bulan Di Provinsi Banten (Rupiah) Tahun 2017-2022**

Kabupaten /Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kab pandeglang	Rp2,164,979	Rp2,363,549	Rp2,542,539	Rp2,758,909	Rp2,800,293
Kab lebak	Rp2,127,112	Rp2,312,384	Rp2,498,068	Rp2,710,654	Rp2,751,314
Kab tangerang	Rp3,270,936	Rp3,555,835	Rp3,841,368	Rp4,168,268	Rp4,230,793
Kab serang	Rp3,258,866	Rp3,542,714	Rp3,827,193	Rp4,152,887	Rp4,215,181

<sup>1</sup> Rini Susilawati, Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia...hal.344

Kota tangerang	Rp3,295,075	Rp3,582,077	Rp3,869,717	Rp4,199,029	Rp4,262,015
Kota cilegon	Rp3,331,997	Rp3,622,215	Rp3,913,078	Rp4,246,081	Rp4,309,773
Kota serang	Rp2,866,595	Rp3,116,276	Rp3,366,512	Rp3,773,940	Rp3,830,549
Kota tangerang selatan	Rp3,270,936	Rp3,555,835	Rp3,841,368	Rp4,168,268	Rp4,230,793

*Sumber: badan pusat statistik (data diolah)*

Dari tabel di atas, rata-rata upah minimum Provinsi Banten mengalami peningkatan secara signifikan. Upah minimum tertinggi berada ditahun 2021 yaitu sebesar Rp4,309,773 di Kota Cilegon, sedangkan upah minimum terendah ditahun 2017 sebesar Rp2,127,112 berada Kabupaten Lebak.

**Penelitian sebelumnya : Rini Sulistiawati (Oktober 2012)** pada penelitiannya yang berjudul **“Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia”**, dengan variabel yang sama, dalam penelitiannya menyatakan bahwa Upah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien jalur yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah tidak searah, artinya apabila terjadi kenaikan upah, maka berpotensi untuk menurunkan penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang produktivitasnya rendah. Penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini bermakna bahwa pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat berjalan searah, artinya apabila penyerapan tenaga kerja meningkat, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian dari pemerintah yakni sebagai upaya dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan salah satunya

yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Faktor PDRB merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi<sup>2</sup>.

**Tabel 1.2 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Banten  
Tahun 2017-2021**

Kabupaten/Kota	Angkatan kerja menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pandeglang	501,045	537,661	529,902	529,562	552,301
Kabupaten Lebak	581,370	622,979	601,147	659,906	635,562
Kabupaten Tangerang	1,651,753	1,684,013	1,812,925	1,836,726	1,842,009
Kabupaten Serang	628,101	669,211	692,076	699,858	709,936
Kota Tangerang	1,046,999	1,050,074	1,104,890	1,127,599	1,141,720
Kota Cilegon	1,858,32	201,579	201,948	204,675	206,507
Kota Serang	293,196	303,803	311,086	322,484	320,184
Kota Tangerang Selatan	708,667	776,658	788,305	832,423	852,435

<sup>2</sup> Nofandillah Arumshyah Putri dan Aris Soelisty, Analisis Pengaruh Upah, Pdrb, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dikawasan Gerbangkertasusila Tahun 2012-2016, *jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 2 Jilid 3/Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja Kabupaten Pandeglang masih menjadi wilayah dengan jumlah angkatan kerja terendah jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Provinsi Banten, sedangkan jumlah angkatan kerja tertinggi ditempati oleh kota tanggerang.

Kenaikan upah dapat menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja, jika tingkat upah meningkat tetapi harga input lain tetap, artinya harga tenaga kerja cukup mahal dibandingkan dengan input lain. Keadaan seperti ini membuat pengusaha akan mengurangi atau memangkas penggunaan tenaga kerja dan mengganti dengan input lain yang relatif lebih murah agar dapat mempertahankan keuntungan maksimal (Kuncoro 2001). Namun hal ini tidak selalu berlaku karena upah minimum juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Naiknya tingkat upah mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga permintaan suatu barang/jasa meningkat serta diikuti semakin banyak perusahaan yang masuk pasar sehingga penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan juga meningkat.

**Tabel 1.3 PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten  
(Rupiah)**

	PDRB ADHK menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pandeglang	17,866,428.41	18,812,931.91	19,644,125.08	19,541,487.52	20,127,757.18
Kabupaten Lebak	18,683,739.21	19,735,870.92	20,810,486.83	20,610,989.12	21,245,043.09
Kabupaten Tangerang	86,964,026.88	92,011,405.21	97,129,166.45	93,482,489.21	97,809,902.21
Kabupaten Serang	49,154,636.22	51,754,319.98	54,347,487.78	53,055,563.37	54,992,522.18
Kota Tangerang	101,274,679.40	106,283,617.41	110,556,398.12	102,898,229.12	106,705,226.94

Kota Cilegon	66,444,529.41	70,502,082.41	74,228,640.69	73,534,471.04	77,071,367.51
Kota Serang	20,153,022.87	21,482,093.45	22,813,096.37	22,517,968.53	23,374,085.22
Kota Tangerang Selatan	52,098,555.90	55,999,106.77	60,137,014.46	59,525,500.40	62,364,157.61

*Sumber: badan pusat statistik (data diolah)*

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa nilai PDRB pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2017-2021 selalu mengalami fluktuasi. Berdasarkan data dari BPS di atas kabupaten Pandeglang menempati wilayah dengan pertumbuhan ekonomi terendah dari tahun 2017-2021, sedangkan Kota Tangerang menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dari tahun 2017-2021 (jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten.).

**Penelitian sebelumnya : Mohammad Sokian, Amri Amir dan Zamzami (2020)** dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kemiskinan Di Kabupaten Sarolangun”**, menyimpulkan hasil penelitiannya, bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat tenaga kerja. Setiap peningkatan atau penurunan pada pertumbuhan ekonomi, tidak berpengaruh terhadap bertambah atau berkurangnya jumlah tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi memiliki arah yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan melalui tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang berhasil dicapai pada tahun tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disajikan secara series, memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi makro dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian regional akan lebih

jelas. Bagi pengguna data akan lebih memberikan manfaat untuk berbagai kepentingan seperti untuk perencanaan, evaluasi maupun untuk kajian.

Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama disetiap negara di dunia khususnya di negara yang sedang berkembang. Kedua masalah tersebut merupakan satu kesatuan yang keduanya menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya <sup>3</sup>.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Dari tahun 2017-2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pertumbuhan ekonomi dalam PDRB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dalam suatu wilayah di Provinsi Banten salah satu penyebabnya adalah adanya penyebaran Covid-19, yang menjadi penentu banyaknya tenaga kerja yang terserap dan tersedianya lapangan pekerjaan di masing-masing wilayah di Provinsi Banten.
2. Peningkatan yang signifikan pada upah minimum yang bertujuan untuk mendorong dan memenuhi hak bagi tenaga kerja berbanding terbalik dengan kondisi dimana meningkatnya upah juga akan mempengaruhi pada biaya tenaga kerja oleh suatu perusahaan.

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan tidak meluas, maka ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi banten tahun 2017-2021, adapun sumber

---

<sup>3</sup> Rini Susilawati, Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sosial*, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012. Hal.196.

data dalam penelitian ini diperoleh melalui badan pusat statistik provinsi banten, dan sumber kepustakaan yang lainnya.

#### **D. Perumusan Masalah**

1. Apakah upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten tahun 2017-2021?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten tahun 2017-2021?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Apakah upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten tahun 2017-2021

#### **F. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi provinsi banten dan permasalahannya.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan khususnya tentang ketenaga kerjaan yang terdapat di provinsi banten, dan diharapkan dapat lebih memperhatikan kembali masalah ketenagakerjaan sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik.

3. Bagi pembaca



Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi sebagai bahan penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini selanjutnya yaitu:

- BAB I**           Pendahuluan, berupa latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II**           Kajian teoritis, bab ini berisi tentang kajian pustaka yang mencakup teori mengenai pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi banten tahun 2017-2021
- BAB III**          Metode penelitian, pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi.
- BAB IV**          Pembahasan, berisi tentang laporan hasil penelitian.
- BAB V**           Bab ini berupa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian skripsi.